

## LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN

### APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

SEMESTER II TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

JALAN SUMBING NO.17 CILACAP



(0282) 534400

inspektorat\_cilacap



inspektoratcilacap@gmail.com

www.inspektorat.cilacapkab.go.id



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester II Tahun 2024. Ikhtisar Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester II Tahun 2024 berisi akumulasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada Semester I dan Semester II tahun 2024.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester II Tahun 2024 ini menyajikan perkembangan hasil pengawasan dan perkembangan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap baik yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non PKPT, Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

Kami berharap dapat memberikan informasi kegiatan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan dimasa mendatang untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester II Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Cilacap, 24 Februari 2025

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

**ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 199001 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                    | <b>ii</b>  |
| <b>RINGKASAN UNTUK PIMPINAN</b>                                      | <b>iii</b> |
| <b>BAB I Informasi Umum</b>                                          | <b>1</b>   |
| A. Dasar Hukum                                                       | 1          |
| B. Struktur Organisasi                                               | 2          |
| C. Kebijakan Strategis                                               | 3          |
| D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan                                | 5          |
| E. Program Penyelenggaraan Pengawasan                                | 6          |
| F. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi           | 6          |
| <b>BAB II Hasil Pengawasan</b>                                       | <b>7</b>   |
| A. Audit                                                             | 18         |
| 1. Audit Kinerja                                                     | 18         |
| 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu                                      | 19         |
| B. Reviu                                                             | 22         |
| C. Evaluasi                                                          | 23         |
| 1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 23         |
| 2. Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)                             | 25         |
| D. Pemantauan                                                        | 26         |
| E. Kegiatan Pengawasan Lainnya                                       | 27         |
| <b>BAB III Pemantauan Tindak Lanjut</b>                              | <b>29</b>  |
| A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI               | 30         |
| B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP                    | 30         |
| <b>BAB IV Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>                  | <b>31</b>  |
| <b>BAB V Penutup</b>                                                 | <b>32</b>  |
| A. Simpulan                                                          | 32         |
| B. Hambatan                                                          | 33         |
| C. Saran / Rekomendasi                                               | 33         |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                      |            |

## **RINGKASAN UNTUK PIMPINAN**

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, pada Semester II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 651 (Enam ratus lima puluh satu) Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Cilacap, antara lain secara garis besar dapat kami laporkan dan kelompokkan sebagai berikut:

### **1. Audit/Pemeriksaan**

Pada Semester II Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan pengawasan berupa Audit/Pemeriksaan pada 88 (Delapan puluh delapan) objek pemeriksaan, yang terdiri dari:

#### **a) Audit Kinerja**

- Audit Kinerja TIK pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE 1 Kegiatan
- Audit Kinerja SKPD 5 Kegiatan
- Audit Kinerja Desa 5 Kegiatan

#### **b) Audit dengan Tujuan Tertentu**

- Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI 2 kegiatan
- Audit Investigasi 8 Kegiatan
- Audit PKKN 1 Kegiatan
- Audit Perjalanan Dinas 3 Kegiatan
- Audit Honorarium 3 Kegiatan
- Pemeriksaan Khusus Aduan Masyarakat 3 Kegiatan
- PDTT Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 11 Kegiatan
- PDTT Tata Kelola Perangkat Daerah 1 Kegiatan
- PDTT Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 15 Kegiatan
- PDTT Hibah 6 Kegiatan
- PDTT Dana Puskesmas 4 Kegiatan
- PDTT Dugaan Tindak Pidana 1 Kegiatan
- PDTT Pengelolaan Keuangan APBD TA 2023 1 Kegiatan
- PDTT Pengelolaan Dana Kelurahan 2 Kegiatan
- PDTT Evaluasi Penyusunan APBDES 2 Kegiatan
- PDTT Kegiatan PTSL 2 Kegiatan

- Pemeriksaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Aset yang tidak ditemukan Fisiknya 12 Kegiatan

## **2. Reviu**

Telah dilaksanakan 29 jenis reviu dengan Jumlah total sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) kegiatan pada Semester I dan II Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Reviu Laporan Realisasi DAU 13 Kegiatan
- Reviu DAK Fisik 59 Kegiatan
- Reviu SIM RS 1 Kegiatan
- Reviu Laporan Keuangan SKPD 10 Kegiatan
- Reviu LPPD 1 Kegiatan
- Reviu Kontrak Daftar Hitam 1 Kegiatan
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri 8 Kegiatan
- Reviu Dana Hibah 1 Kegiatan
- Reviu LKPD BUD 1 Kegiatan
- Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas 1 Kegiatan
- Reviu Kinerja 5 Kegiatan
- Reviu Dokumen RKPD 1 Kegiatan
- Reviu THR dan Gaji-13 PPPK 1 Kegiatan
- Reviu RPJPD 1 Kegiatan
- Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa 1 Kegiatan
- Reviu ASB 1 Kegiatan
- Reviu Pembayaran Gaji PPPK 6 Kegiatan
- Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik 2 Kegiatan
- Reviu Dokumen Perubahan RKPD 1 Kegiatan
- Reviu KUA PPAS 1 Kegiatan
- Reviu SSH 1 Kegiatan
- Reviu Perbaikan dan Pengganti Data Hasil Verifikasi Lapangan Inpres Percepatan ald 1 Kegiatan
- Reviu Manajemen ASN dan Benturan Kepentingan 1 Kegiatan
- Reviu Penghapusan Piutang BPHTB 1 Kegiatan
- Reviu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan 1 Kegiatan

- Reviu APIP atas Pemenuhan TKDN 10 Kontrak PBJ (Utama 5 Alkes dan 5 Elektronik) 1 Kegiatan
- Reviu atas Kebenaran Jumlah Siswa ditampung pada Penerimaan PPDB 5 Kegiatan
- Reviu SPJ Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 1 Kegiatan
- Reviu RKA 1 Kegiatan

### **3. Evaluasi**

Pada Semester I dan II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan 55 (lima puluh sembilan) kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) pada 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 24 Kecamatan dan 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta 4 (empat) Kegiatan Evaluasi Pengarusutamaan Gender.

### **4. Pemantauan**

Pada Semester I dan II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pemantauan/monitoring sebanyak 268 (Dua ratus enam puluh delapan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD 2 kegiatan
- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi 1 Kegiatan
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah 261 Kegiatan
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi 2 Kegiatan
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI 2 Kegiatan

### **5. Kegiatan Pengawasan Lainnya**

Pada Semester I dan II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan 107 (Seratus tujuh) kegiatan Pengawasan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Probity Audit Tahap Perencanaan 10 kegiatan
- Verifikasi Data by Name by Address (BNBA) 2 Kegiatan
- Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 11 Kegiatan
- Pengumpulan Bahan dan Keterangan Atas Pengaduan Masyarakat 2 Kegiatan
- Pengawasan Pasca Pelaksanaan PPDB 9 Kegiatan
- Pengawasan Pengadaan ASN 1 Kegiatan

- Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 6 Kegiatan
- Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi 5 Kegiatan
- Opname Kas Persediaan 44 Kegiatan
- Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On going) Reformasi Birokrasi 2 Kegiatan
- Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa Anti Korupsi) 7 Kegiatan
- Asistensi Manajemen Risiko 6 Kegiatan
- Pengawasan Peningkatan Produksi Padi 2 Kegiatan.

Adapun jumlah temuan hasil pemeriksaan tersebut adalah 828 temuan dengan nilai finansial sebesar Rp1.550.977.582,20 dan 1.391 rekomendasi terinci dalam Sub Kelompok rekomendasi, yaitu :

| No | Sub Kelompok Rekomendasi                                                                            | Jumlah       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat.                                        | 147          |
| 2  | Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan Masyarakat                                   | -            |
| 3  | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan      | -            |
| 4  | Penghapusan barang milik negara/daerah                                                              | -            |
| 5  | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian                                                         | -            |
| 6  | Perbaikan laporan dan penertiban administrasi                                                       | 1.227        |
| 7  | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan                                               | -            |
| 8  | Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia pendukung system pengendali                            | -            |
| 9  | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan.                                         | -            |
| 10 | Perubahan atau perbaikan struktur organisasi.                                                       | -            |
| 11 | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang. | 17           |
| 12 | Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern.               | -            |
| 13 | Pelaksanaan Sosialisasi                                                                             | -            |
| 14 | Lain-lain                                                                                           | -            |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                       | <b>1.391</b> |

\*Data Akumulasi Semester I dan II Tahun 2024

## **6. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Pada Semester I dan II Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menangani kasus pengaduan masyarakat sebanyak 12 aduan masyarakat.

## **7. Permasalahan-permasalahan yang dijumpai**

Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap permasalahan yang sering terjadi antara lain:

1. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tertib.
2. Pengeluaran Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan standar pelaksanaan pekerjaan.
4. Inefisiensi belanja Material untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang berakibat terjadi pemborosan keuangan daerah/desa.
5. Pelaksanaan pekerjaan sarana prasarana tidak sesuai dengan volume sesuai dengan RAB.
6. Pajak atas belanja dana desa belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara.
7. Belanja langsung tidak diyakini kebenarannya.
8. Belanja tidak disertai dengan bukti dukung yang memadai sebagai lampiran LPJ.
9. Sistem pengendalian intern yang kurang maksimal sehingga masih sering terjadi *Fraud*.

## **8. Saran/Rekomendasi :**

1. Kepada setiap jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus meningkatkan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara berjenjang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Untuk mengoptimalkan fungsi monitoring kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi verifikasi terhadap pengelolaan keuangan di desa serta perlu disusun pedoman teknis monitoring dan evaluasi dari Dispermades selaku Dinas Teknis, sehingga ada kejelasan

maksud, tujuan, sasaran serta hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan fungsi tersebut.

3. Untuk pengelolaan dana BOS diperlukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin atas Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dana BOS oleh Dinas Teknis, dikarenakan sebagian besar pengelola dana BOS di sekolah adalah guru yang tidak memiliki dasar pengetahuan akuntansi.
4. Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan baik di OPD maupun Desa perlu terus dilakukan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan fasilitasi dalam hal pengelolaan keuangan sehingga tidak terjadi temuan berulang dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *Good Government dan Clean Governance* dapat terwujud.
5. Perlunya penggunaan sistem aplikasi yang khusus menangani kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat dimonitor secara tepat dan akurat.
6. Perlunya Sosialisasi Pencegahan Anti Korupsi secara terus - menerus serta mencakup seluruh *stakeholder* internal dan eksternal Pemerintah Daerah agar tercipta pencegahan dan deteksi dini serta preventif disetiap kegiatan untuk terciptanya *Good Government dan Clean Governance*.

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM**

#### **A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/823/14/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
10. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/83/14/TAHUN 2025 Tentang Penetapan Pembagian Wilayah Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.

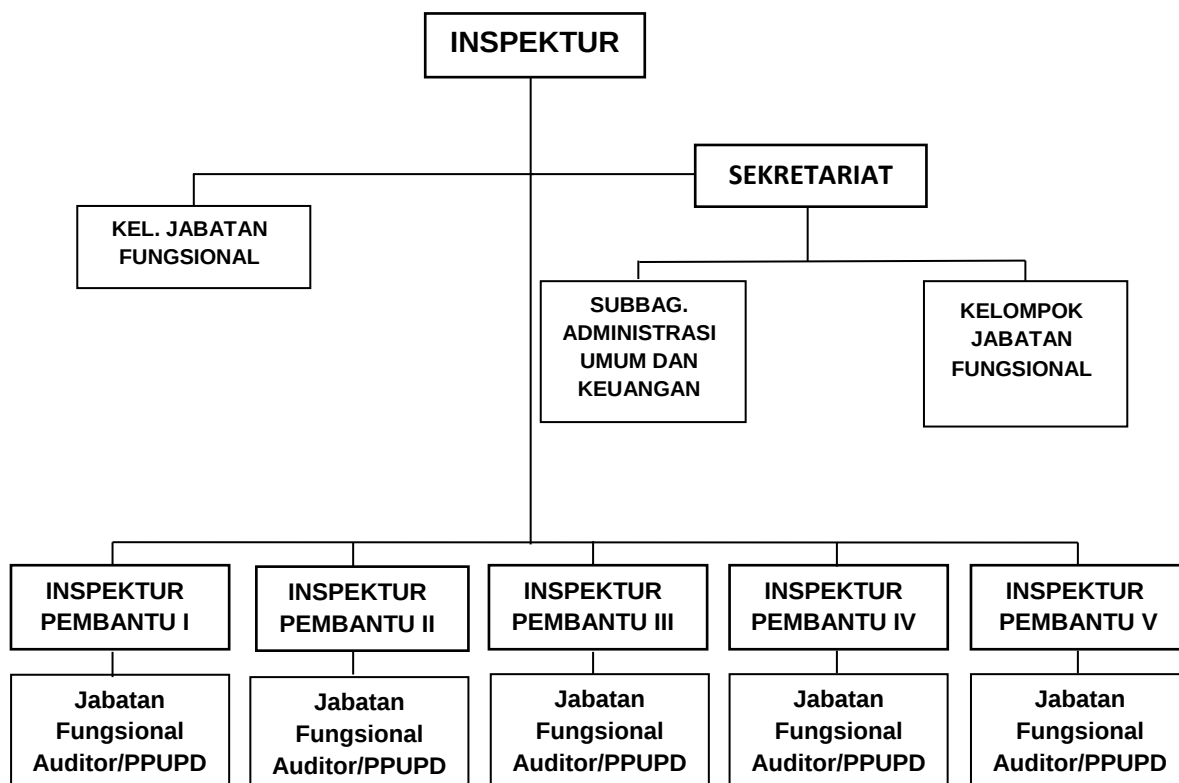
## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dapat diuraikan dan digambarkan sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

- 1). Inspektur Daerah
- 2). Sekretariat membawahkan:
  - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- 3). Inspektur Pembantu terdiri dari:
  - Inspektur Pembantu I
  - Inspektur Pembantu II
  - Inspektur Pembantu III
  - Inspektur Pembantu IV
  - Inspektur Pembantu V

b. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap



## C. Kebijakan Strategis

### 1. Eksternal

Visi pembangunan jangka panjang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah: “Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera” dimana dalam periode tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan Tahun Anggaran 2023-2026 adalah memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari;
2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi;
3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tenteram dan damai;
4. Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan perannya sebagai agen pembangunan sehingga stabilitas pertumbuhan perekonomian yang tinggi dapat tercapai;
5. Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tercipta produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak diminati;
6. Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam;
7. Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan;
8. Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara mandiri;
9. Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang sama besar dengan faktor pembangunan lainnya sehingga partisipasinya menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan.

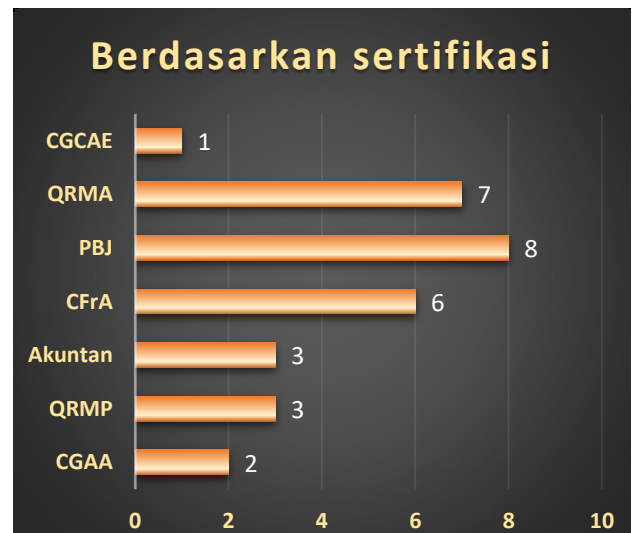
### 2. Internal

Sebagai gambaran mengenai keberhasilan penguatan dibidang pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera dalam Renstra Periode Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatkan Penerapan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Maturitas SPIP Level 3.

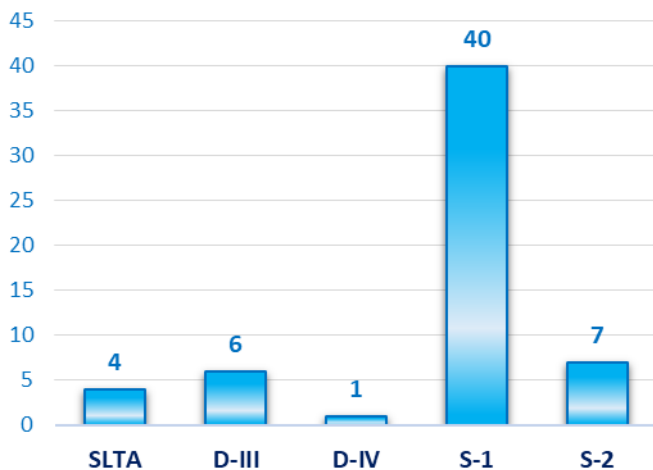
Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam Renstra perlu didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

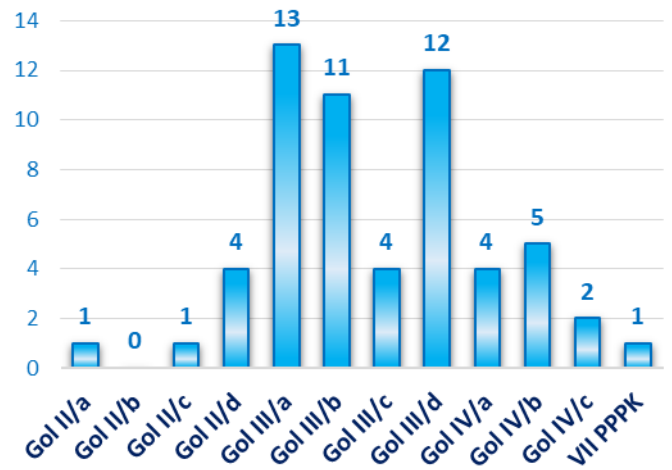
Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki 58 (Lima puluh delapan) sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Selengkapnya data ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Berdasarkan Pendidikan**



**Berdasarkan Golongan**



Profil Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap

b) Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Data Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap**

| NO            | JENIS BARANG                             | NILAI                   |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>      | <b>ASET TETAP</b>                        | <b>5.136.892.713,00</b> |
| 1             | Tanah                                    | 354.212.500,00          |
| 2             | Peralatan dan Mesin                      | 5.732.547.747,50        |
| 3             | Gedung dan Bangunan                      | 3.342.770.555,00        |
| 4             | Jalan, Jaringan dan Irigasi              | 138.481.000,00          |
| 5             | Aset Tetap Lainnya                       | 60.092.400,00           |
| 6             | Konstruksi Dalam Pengerjaan              | 0.00                    |
| 7             | Akumulasi Penyusutan                     | (4.491.211.489,50)      |
|               |                                          |                         |
| <b>B</b>      | <b>ASET LAINNYA</b>                      | <b>9.881.666,67</b>     |
| 1             | Kemitraan dengan Pihak Ketiga            | 0.00                    |
| 2             | Aset Tidak Berwujud                      | 113.228.500,00          |
| 3             | Aset Rusak Berat                         | 37.136.000,00           |
| 4             | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (103.346.833,33)        |
| 5             | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya        | (37.136.000,00)         |
| <b>JUMLAH</b> |                                          | <b>5.146.774.379,67</b> |

**D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pasal 54 menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP, sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
3. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
4. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;

5. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan Intern Pemerintah.

#### E. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Adapun Program Penyelenggaraan Pengawasan tersebut, antara lain meliputi:

| NO | KEGIATAN                                          | SUB KEGIATAN                                                                                               | ANGGARAN                | REALISASI             | SISA ANGGARAN         | PROSENTASE (%) |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1  | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal      | a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 179.708.400,00          | 157.474.900,00        | 22.233.500,00         | 87,63          |
|    |                                                   | b. Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 228.043.300,00          | 96.901.350,00         | 131.141.950,00        | 42,49          |
|    |                                                   | c. Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 13.527.300,00           | 7.282.850,00          | 6.244.450,00          | 53,84          |
|    |                                                   | d. Pengawasan Desa                                                                                         | 132.147.600,00          | 94.935.600,00         | 37.212.000,00         | 71,84          |
|    |                                                   | e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 113.668.500,00          | 72.369.300,00         | 41.299.200,00         | 63,67          |
|    |                                                   |                                                                                                            |                         |                       | -                     |                |
| 2  | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan | a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 139.260.000,00          | 76.199.100,00         | 63.060.900,00         | 54,72          |
|    |                                                   | b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 489.073.300,00          | 281.812.966,00        | 207.260.334,00        | 57,62          |
|    |                                                   |                                                                                                            |                         |                       |                       |                |
|    |                                                   | <b>JUMLAH</b>                                                                                              | <b>1.295.428.400,00</b> | <b>786.976.066,00</b> | <b>508.452.334,00</b> | <b>60,75</b>   |

#### F. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap antara lain meliputi :

| NO | KEGIATAN                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                 | ANGGARAN                | REALISASI               | SISA ANGGARAN         | PROSENTASE (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | 133.900.000,00          | 101.257.300,00          | 32.642.700,00         | 75,62          |
|    |                                                                           | b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | 8.193.700,00            | 7.480.900,00            | 712.800,00            | 91,30          |
|    |                                                                           |                                                                                              |                         |                         | -                     |                |
| 2  | Pendampingan dan Asistensi                                                | a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 561.040.500,00          | 457.699.800,00          | 103.340.700,00        | 81,58          |
|    |                                                                           | b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     | 52.988.500,00           | 45.419.900,00           | 7.568.600,00          | 85,72          |
|    |                                                                           | c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1.178.774.100,00        | 1.133.831.750,00        | 44.942.350,00         | 96,19          |
|    |                                                                           | d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | 47.698.100,00           | 45.731.050,00           | 1.967.050,00          | 95,88          |
|    |                                                                           |                                                                                              |                         |                         |                       |                |
|    |                                                                           | <b>JUMLAH</b>                                                                                | <b>1.982.594.900,00</b> | <b>1.791.420.700,00</b> | <b>191.174.200,00</b> | <b>90,36</b>   |

## BAB II HASIL PENGAWASAN

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sampai dengan Semester II tahun anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan berdasarkan PKPT semester II Tahun 2024.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada semester II Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 651 (Enam ratus lima puluh satu) Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun program pengawasan dan realisasinya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
**Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester 2 Tahun 2024**

| No | Kegiatan Pengawasan         | PKPT              |                           |                      |                           | Non PKPT             |                           |
|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|    |                             | Target Pengawasan |                           | Realisasi Pengawasan |                           | Realisasi Pengawasan |                           |
|    |                             | Jml KP            | Jml dana pengawasan (Rp.) | Jml KP               | Jml dana pengawasan (Rp.) | Jml KP               | Jml dana pengawasan (Rp.) |
| A  | Audit<br>-Kinerja<br>-PDTT  | 64                | 365.651.300,00            | 88                   | 233.870.150,00            | -                    | -                         |
| B  | Reviu                       | 61                | 135.133.200,00            | 129                  | 64.916.350,00             | -                    | -                         |
| C  | Evaluasi                    | 62                | 257.972.300,00            | 59                   | 178.078.200,00            | -                    | -                         |
| D  | Pemantauan                  | 150               | 113.668.500,00            | 268                  | 72.369.300,00             | -                    | -                         |
| E  | Kegiatan Pengawasan Lainnya | 35                | 476.788.900,00            | 107                  | 237.742.066,00            | -                    | -                         |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>372</b>        | <b>1.295.428.400,00</b>   | <b>651</b>           | <b>786.986.066,00</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>                  |

Keterangan:

a. KP = Kegiatan Pengawasan

b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan

**Grafik 1**  
**Realisasi Kegiatan Pengawasan Berdasarkan PKPT Semester 2 Tahun 2024**



\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

Pada semester II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 651 (Enam ratus lima puluh satu) objek pengawasan. Adapun penjelasan rinci kegiatan pengawasan per jenis kegiatan dan per objek pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Kegiatan Pengawasan per Jenis Kegiatan berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester II Tahun 2024**

| No       | Uraian                                                                               | Jumlah    | Prosentase    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Audit/Pemeriksaan</b>                                                             | <b>88</b> | <b>13.52%</b> |
|          | <b>Sub: Audit Kinerja</b>                                                            |           |               |
| 1        | Audit Kinerja TIK                                                                    | 1         | 0.16%         |
| 2        | Audit Kinerja SKPD                                                                   | 5         | 0.78%         |
| 3        | Audit Kinerja Desa                                                                   | 5         | 0.78%         |
|          | <b>Sub: Audit Dengan Tujuan Tertentu</b>                                             |           |               |
| 4        | Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI                                              | 2         | 0.31%         |
| 5        | Audit Investigasi                                                                    | 8         | 1.24%         |
| 6        | Audit PKKN                                                                           | 1         | 0.16%         |
| 7        | Audit Perjalanan Dinas                                                               | 3         | 0.47%         |
| 8        | Audit Honorarium                                                                     | 3         | 0.47%         |
| 9        | Pemeriksaan Khusus Aduan Masyarakat                                                  | 3         | 0.47%         |
| 10       | Pemeriksaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Aset yang tidak ditemukan fisiknya | 12        | 1.86%         |
| 11       | PDTT Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                              | 11        | 1.71%         |

| No       | Uraian                                                                                           | Jumlah     | Prosentase    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 12       | PDTT Tata Kelola Perangkat Daerah                                                                | 1          | 0.16%         |
| 13       | PDTT Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa                                                          | 15         | 2.33%         |
| 14       | PDTT Hibah                                                                                       | 6          | 0.93%         |
| 15       | PDTT Dana Puskesmas                                                                              | 4          | 0.62%         |
| 16       | PDTT Dugaan Tindak Pidana                                                                        | 1          | 0.16%         |
| 17       | PDTT Pengelolaan Keuangan APBD TA 2023                                                           | 1          | 0.16%         |
| 18       | PDTT Pengelolaan Dana Kelurahan                                                                  | 2          | 0.31%         |
| 19       | PDTT Evaluasi Penyusunan APBDES                                                                  | 2          | 0.31%         |
| 20       | PDTT Kegiatan PTSL                                                                               | 2          | 0.31%         |
| <b>B</b> | <b>Reviu</b>                                                                                     | <b>129</b> | <b>19.82%</b> |
| 21       | Reviu Laporan Realisasi DAU                                                                      | 13         | 2.02%         |
| 22       | Reviu DAK Fisik                                                                                  | 59         | 9.06%         |
| 23       | Reviu SIM RS                                                                                     | 1          | 0.16%         |
| 24       | Reviu Laporan Keuangan SKPD                                                                      | 10         | 1.55%         |
| 25       | Reviu LPPD                                                                                       | 1          | 0.16%         |
| 26       | Reviu Kontrak Daftar Hitam                                                                       | 1          | 0.16%         |
| 27       | Reviu Harga Perkiraan Sendiri                                                                    | 8          | 1.24%         |
| 28       | Reviu Dana Hibah                                                                                 | 1          | 0.16%         |
| 29       | Reviu LKPD BUD                                                                                   | 1          | 0.16%         |
| 30       | Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas                                                           | 1          | 0.16%         |
| 31       | Reviu Kinerja                                                                                    | 5          | 0.78%         |
| 32       | Reviu Dokumen RKPD                                                                               | 1          | 0.16%         |
| 33       | Reviu THR dan Gaji-13 PPPK                                                                       | 1          | 0.16%         |
| 34       | Reviu RPJPD                                                                                      | 1          | 0.16%         |
| 35       | Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa                                              | 1          | 0.16%         |
| 36       | Reviu ASB                                                                                        | 1          | 0.16%         |
| 37       | Reviu Pembayaran Gaji PPPK                                                                       | 6          | 0.93%         |
| 38       | Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik | 2          | 0.31%         |
| 39       | Reviu Dokumen Perubahan RKPD                                                                     | 1          | 0.16%         |
| 40       | Reviu KUA PPAS                                                                                   | 1          | 0.16%         |
| 41       | Reviu SSH                                                                                        | 1          | 0.16%         |
| 42       | Reviu Perbaikan dan Pengganti Data Hasil Verifikasi Lapangan Inpres Percepatan ALD               | 1          | 0.16%         |
| 43       | Reviu Manajemen ASN dan Benturan Kepentingan                                                     | 1          | 0.16%         |
| 44       | Reviu Penghapusan Piutang BPHTB                                                                  | 1          | 0.16%         |
| 45       | Reviu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan                                                          | 1          | 0.16%         |
| 46       | Reviu APIP Atas Pemenuhan TKDN 10 Kontrak PBJ (Utama 5 Alkes dan 5 Elektronik)                   | 1          | 0.16%         |
| 47       | Reviu Atas Kebenaran Jumlah Siswa Ditampung pada Penerimaan PPDB                                 | 5          | 0.78%         |
| 48       | Reviu SPJ Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah                                                     | 1          | 0.16%         |
| 49       | Reviu RKA                                                                                        | 1          | 0.16%         |
| <b>C</b> | <b>Evaluasi</b>                                                                                  | <b>59</b>  | <b>9.06%</b>  |
| 50       | Evaluasi LKJIP                                                                                   | 55         | 8.54%         |
| 51       | Evaluasi PUG                                                                                     | 4          | 0.62%         |

| No       | Uraian                                                                                       | Jumlah     | Prosentase    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>D</b> | <b>Pemantauan</b>                                                                            | <b>268</b> | <b>42.70%</b> |
| 52       | Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD                                                | 2          | 0.31%         |
| 53       | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi                                       | 1          | 0.16%         |
| 54       | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah                                 | 261        | 40.09%        |
| 55       | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi                               | 2          | 0.31%         |
| 56       | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI                                             | 2          | 0.31%         |
| <b>E</b> | <b>Kegiatan Pengawasan Lainnya</b>                                                           | <b>107</b> | <b>14.90%</b> |
| 57       | Probity Audit Tahap Perencanaan                                                              | 10         | 1.55%         |
| 58       | Verifikasi Data by Name by Address (BNBA)                                                    | 2          | 0.31%         |
| 59       | Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                     | 11         | 1.71%         |
| 60       | Pengumpulan Bahan dan Keterangan Atas Pengaduan Masyarakat                                   | 2          | 0.31%         |
| 61       | Pengawasan Pasca Pelaksanaan PPDB                                                            | 9          | 1.40%         |
| 62       | Pengawasan Pengadaan ASN                                                                     | 1          | 0.16%         |
| 63       | Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP                                                           | 6          | 0.93%         |
| 64       | Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi                                              | 5          | 0.78%         |
| 65       | Opname Kas Persediaan                                                                        | 44         | 6.83%         |
| 66       | Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On going) Reformasi Birokrasi         | 2          | 0.31%         |
| 67       | Pendampingan Hasil Sosialisasi tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa Anti Korupsi) | 7          | 1.09%         |
| 68       | Asistensi Manajemen Risiko                                                                   | 6          | 0.93%         |
| 69       | Pengawalan Peningkatan Produksi Padi                                                         | 2          | 0.31%         |
|          | <b>JUMLAH</b>                                                                                | <b>651</b> | <b>100%</b>   |

Keterangan:

- KP = Kegiatan Pengawasan
- Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan

**Tabel 4**  
**Jumlah Objek Pengawasan Semester II Tahun 2024**

| No       | Objek Pemeriksaan                                                                    | 651       | 100.00%      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Sekolah Negeri</b>                                                                | <b>36</b> | <b>5.53%</b> |
| 1        | Opname Kas Persediaan                                                                | 4         | 0.61%        |
| 2        | PDTT Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                              | 10        | 1.54%        |
| 3        | Pemeriksaan Khusus Aduan Masyarakat                                                  | 4         | 0.61%        |
| 4        | Pengawasan Pasca PPDB                                                                | 14        | 2.15%        |
| 5        | Pemeriksaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Aset Yang Tidak Ditemukan Fisiknya | 4         | 0.61%        |
| <b>B</b> | <b>Kecamatan</b>                                                                     | <b>63</b> | <b>9.68%</b> |
| 6        | PDTT Pengelolaan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023                                   | 1         | 0.15%        |
| 7        | Reviu Laporan Keuangan SKPD                                                          | 4         | 0.61%        |
| 8        | Evaluasi LKJIP                                                                       | 24        | 3.69%        |

| No       | Objek Pemeriksaan                                                                                | 651        | 100.00%       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 9        | Reviu THR dan Gaji-13 PPPK                                                                       | 1          | 0.15%         |
| 10       | Evaluasi PUG                                                                                     | 4          | 0.61%         |
| 11       | Asistensi Manajemen Risiko                                                                       | 5          | 0.77%         |
| 12       | Opname Kas Persediaan                                                                            | 24         | 3.69%         |
| <b>C</b> | <b>Desa/Kelurahan</b>                                                                            | <b>63</b>  | <b>9.68%</b>  |
| 13       | PDTT Pengelolaan Dana Kelurahan                                                                  | 2          | 0.31%         |
| 14       | Pemeriksaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Aset Yang Tidak Ditemukan Fisiknya             | 3          | 0.46%         |
| 15       | Audit Kinerja Desa                                                                               | 5          | 0.77%         |
| 16       | Audit Investigasi                                                                                | 1          | 0.15%         |
| 17       | PDTT Evaluasi Penyusunan APBDES                                                                  | 2          | 0.31%         |
| 18       | Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa Anti Korupsi)     | 18         | 2.76%         |
| 19       | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kegiatan PTSL                                          | 2          | 0.31%         |
| 20       | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi                                           | 1          | 0.15%         |
| 21       | Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Pengaduan Masyarakat                                       | 2          | 0.31%         |
| 22       | Opname Kas Persediaan                                                                            | 10         | 1.54%         |
| 23       | Pemeriksaan Khusus                                                                               | 1          | 0.15%         |
| 24       | PDTT Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa                                                          | 15         | 2.30%         |
| 25       | PDTT Tata Kelola Perangkat Daerah                                                                | 1          | 0.15%         |
| <b>D</b> | <b>OPD</b>                                                                                       | <b>184</b> | <b>28.26%</b> |
| 26       | Opname Kas Persediaan                                                                            | 6          | 0.92%         |
| 27       | Verifikasi Data By Name By Address (BNBA)                                                        | 1          | 0.15%         |
| 28       | Reviu Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum                                                        | 13         | 2.00%         |
| 29       | Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik                                                                  | 52         | 7.99%         |
| 30       | Reviu Kinerja                                                                                    | 3          | 0.46%         |
| 31       | Reviu Laporan Keuangan SKPD                                                                      | 6          | 0.92%         |
| 32       | Reviu LPPD                                                                                       | 1          | 0.15%         |
| 33       | Reviu Kontrak Daftar Hitam                                                                       | 1          | 0.15%         |
| 34       | Reviu Harga Perkiraan Sendiri                                                                    | 6          | 0.92%         |
| 35       | Evaluasi LKJIP                                                                                   | 29         | 4.45%         |
| 36       | Audit Investigasi                                                                                | 4          | 0.61%         |
| 37       | Reviu LKPD BUD                                                                                   | 1          | 0.15%         |
| 38       | Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI                                                          | 2          | 0.31%         |
| 39       | Reviu Dokumen RKPD                                                                               | 1          | 0.15%         |
| 40       | Audit Kinerja SKPD                                                                               | 5          | 0.77%         |
| 41       | Reviu RPJPD                                                                                      | 1          | 0.15%         |
| 42       | Penjaminan Kualitas Maturisasi SPIP Terintegrasi                                                 | 5          | 0.77%         |
| 43       | Reviu ASB                                                                                        | 1          | 0.15%         |
| 44       | Reviu Pembayaran Gaji PPPK                                                                       | 6          | 0.92%         |
| 45       | Reviu TIK                                                                                        | 1          | 0.15%         |
| 46       | Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik | 2          | 0.31%         |
| 47       | Reviu Dokumen Perubahan                                                                          | 1          | 0.15%         |
| 48       | Reviu KUA PPAS                                                                                   | 1          | 0.15%         |
| 49       | Reviu SSH                                                                                        | 1          | 0.15%         |

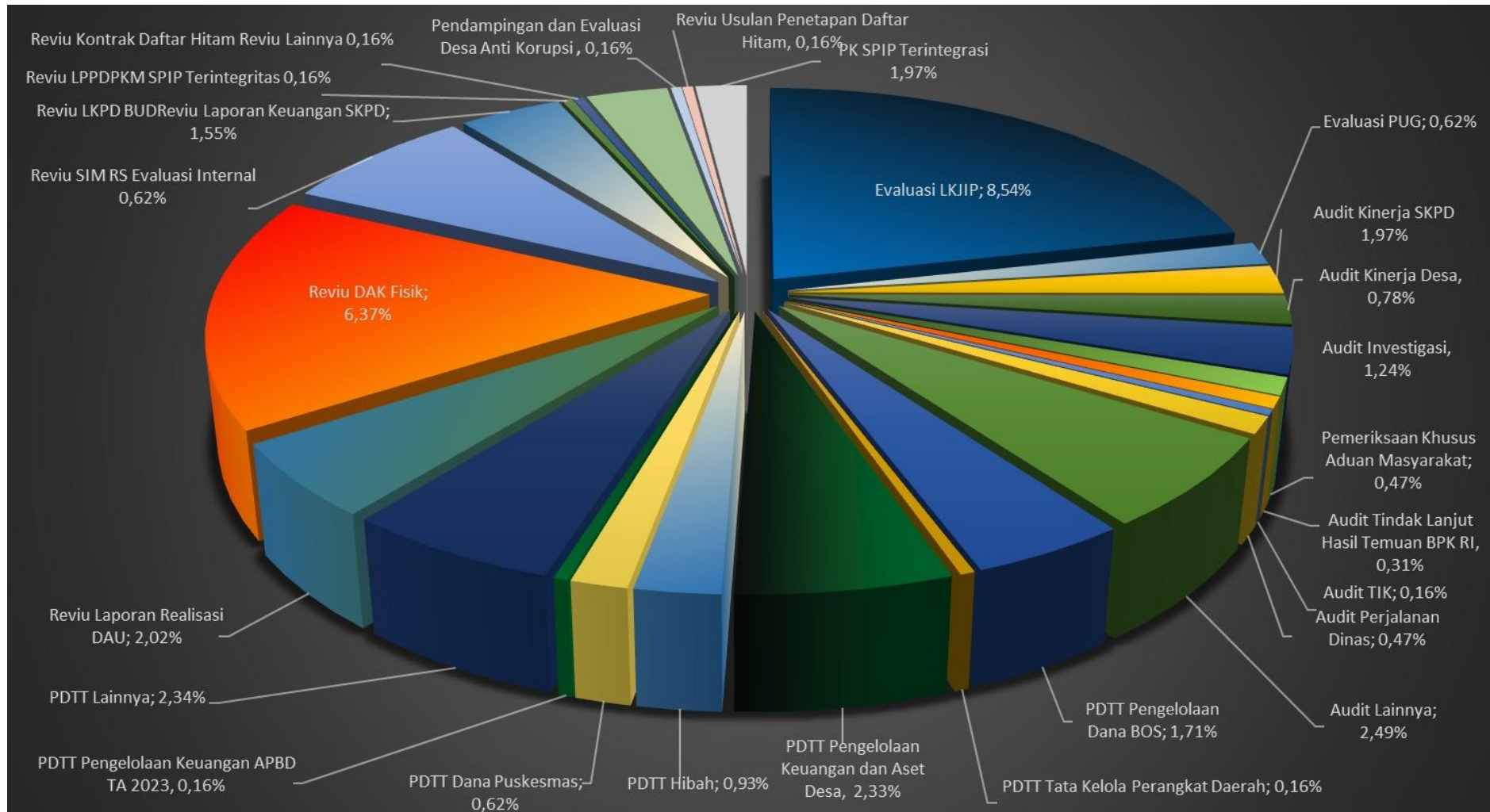
| No       | Objek Pemeriksaan                                                                    | 651        | 100.00%       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 50       | Reviu Perbaikan dan Pengganti Data Hasil Verifikasi Lapangan Inpres Percepatan ALD   | 1          | 0.15%         |
| 51       | PDTT Hibah                                                                           | 6          | 0.92%         |
| 52       | Reviu Manajemen ASN dan Benturan Kepentingan                                         | 1          | 0.15%         |
| 53       | Reviu Penghapusan Piutang BHPTB                                                      | 1          | 0.15%         |
| 54       | Probity Audit                                                                        | 6          | 0.92%         |
| 55       | Audit PKKN                                                                           | 1          | 0.15%         |
| 56       | Pengawasan Produksi Padi                                                             | 2          | 0.31%         |
| 57       | PDTT Dana Bansos                                                                     | 1          | 0.15%         |
| 58       | Reviu APIP atas Pemenuhan TKDN 10 Kontrak PBJ (Utama 5 Alkes dan 5 elektronik)       | 1          | 0.15%         |
| 59       | Pengawasan Pengadaan ASN                                                             | 1          | 0.15%         |
| 60       | Reviu RKA                                                                            | 1          | 0.15%         |
| 61       | Audit Perjalanan Dinas                                                               | 3          | 0.46%         |
| 62       | Audit Honorarium                                                                     | 3          | 0.46%         |
| 63       | Reviu SPJ Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah                                         | 1          | 0.15%         |
| 64       | Asisten Manajemen Risiko                                                             | 1          | 0.15%         |
| 65       | Pemeriksaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Aset Yang Tidak Ditemukan Fisiknya | 4          | 0.61%         |
| <b>E</b> | <b>Lainnya</b>                                                                       | <b>305</b> | <b>46.85%</b> |
| 66       | Probity Audit Tahap Perencanaan                                                      | 4          | 0.61%         |
| 67       | Reviu SIM RS                                                                         | 1          | 0.15%         |
| 68       | Percepatan Verifikasi BNBA                                                           | 1          | 0.15%         |
| 69       | Reviu Dana Hibah                                                                     | 1          | 0.15%         |
| 70       | Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD                                        | 2          | 0.31%         |
| 71       | Evaluasi LKJIP                                                                       | 2          | 0.31%         |
| 72       | Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                                                  | 2          | 0.31%         |
| 73       | Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                                                | 7          | 1.08%         |
| 74       | Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas                                               | 1          | 0.15%         |
| 75       | Reviu Kinerja                                                                        | 2          | 0.31%         |
| 76       | Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On-Going)Reformasi Birokrasi  | 2          | 0.31%         |
| 77       | Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP                                                   | 6          | 0.92%         |
| 78       | Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa                                  | 1          | 0.15%         |
| 79       | PDTT Dana Puskesmas                                                                  | 4          | 0.61%         |
| 80       | Reviu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan                                              | 1          | 0.15%         |
| 81       | Audit Investigasi Kasus                                                              | 2          | 0.31%         |
| 82       | Pemeriksaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Aset Yang Tidak Ditemukan Fisiknya | 1          | 0.15%         |
| 83       | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah                         | 261        | 40.09%        |
| 84       | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi                       | 2          | 0.31%         |
| 85       | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI                                     | 2          | 0.31%         |

\*Akumulasi data semester I dan II tahun 2024

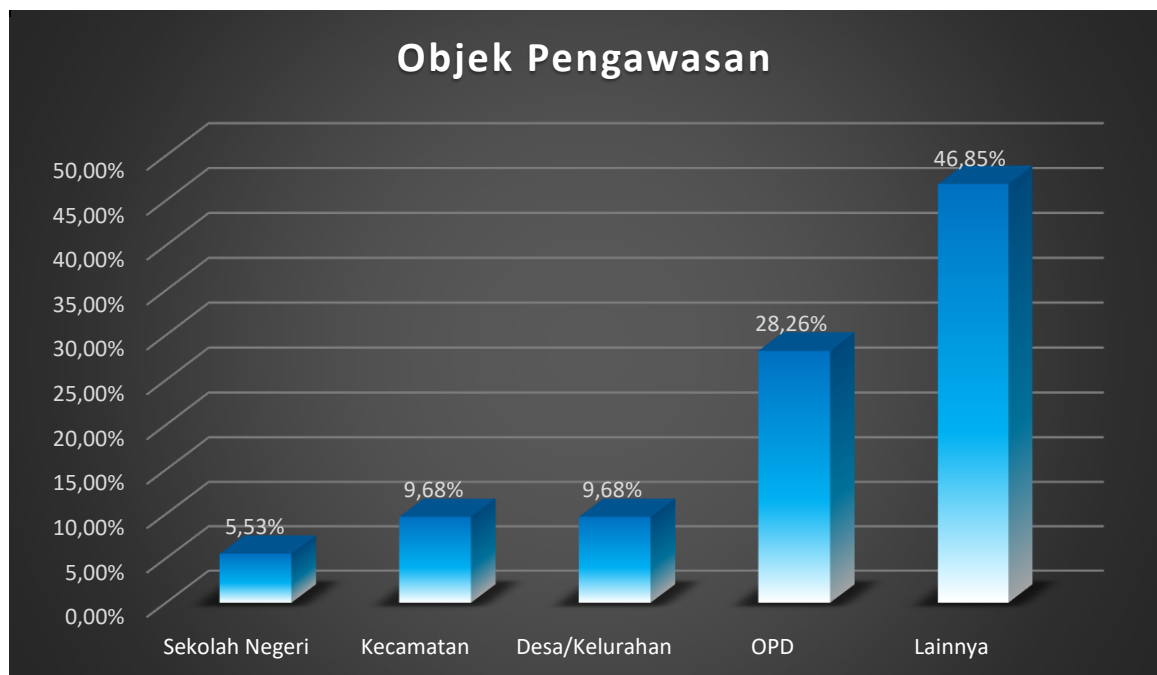
Dalam pelaksanaan PKPT tersebut di atas, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 700/520/14/TAHUN 2024 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 sebagai berikut :

| NO. | INSPEKTUR<br>PEMBANTU I        | INSPEKTUR<br>PEMBANTU II    | INSPEKTUR<br>PEMBANTU III | INSPEKTUR<br>PEMBANTU IV | INSPEKTUR<br>PEMBANTU V   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.  | DINAS P dan K                  | SEKRETARIAT DPRD            | BAPPEDA                   | DINKES KB                | SEKRETARIAT DAERAH        |
| 2.  | SATPOL PP                      | BPBD                        | BPKAD                     | RSUD CILACAP             | DISDUKCAPIL               |
| 3.  | DISPARPORA                     | DINSOS PP PA                | BAPENDA                   | RSUD MAJENANG            | DINAS PERIKANAN           |
| 4.  | DISNAKERIN                     | DISKOMINFO                  | INSPEKTORAT DAERAH        | DPUPR                    | DPMPTSP                   |
| 5.  | DPKUKM                         | DINAS PERTANIAN             | DISHUB                    | DINAS PSDA               | WIL. KEC KARANGPUCUNG     |
| 6.  | BAKESBANGPOL                   | DISPERMADES                 | BKPSDM                    | DLH                      | WIL. KEC<br>GANDRUNGMANGU |
| 7.  | WIL. KEC WANAREJA              | DINAS ARPUS                 | WIL. KEC CIMANGGU         | WIL. KEC MAJENANG        | WIL. KEC KAWUNGANTEN      |
| 8.  | WIL. KEC KEDUNGREJA            | DISHANPAN                   | WIL. KEC CIPARI           | WIL. KEC SIDAREJA        | WIL. KEC BINANGUN         |
| 9.  | WIL. KEC BANTARSARI            | WIL. KEC DAYEUHLUHUR        | WIL. KEC ADIPALA          | WIL. KEC KESUGIHAN       | PT CILACAP SEGARA ARTHA   |
| 10. | WIL. KEC NUSAWUNGU             | WIL. KEC PATIMUAN           | WIL. KEC SAMPANG          | WIL. KEC MAOS            |                           |
| 11. | WIL. KEC CILACAP<br>TENGAH     | WIL. KEC JERUKLEGI          | WIL. KEC CILACAP<br>UTARA | WIL. KEC KAMPUNG LAUT    |                           |
| 12. | PD.PERCETAKAN GRAFIKA<br>INDAH | WIL. KEC KROYA              | PERUMDA CAHAYA H<br>USADA | PERUMDAM TIRTA WIJAYA    |                           |
| 13. |                                | WIL. KEC CILACAP<br>SELATAN |                           |                          |                           |

**Grafik 2**  
**Realisasi Pengawasan Per Jenis Kegiatan Pengawasan**  
**Semester I dan II Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap**



**Grafik 3.**  
**Objek Pengawasan Semester I dan II Tahun 2024**



Pada semester I dan II Tahun 2024 terdapat 651 (Enam ratus lima puluh satu) kegiatan pengawasan dengan 828 temuan 1.391 rekomendasi dengan nilai Rp1.550.977.582,20 dengan rincian temuan sesuai Tabel 5 Temuan Hasil Audit/Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap semester I dan II Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap semester I dan II Tahun 2024**

| No | Sub Kelompok Temuan*)                                                                                       | Kode           | Jumlah Kejadian | %           | Nilai (Rp)              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                                           | 3              | 4               | 5           | 6                       |
|    | <b>Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan</b>                                                             | <b>1.00.00</b> |                 |             |                         |
| 1  | Kerugian Negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah         | 1.01.00        | 136             | 16.43%      | 1.532.985.638,85        |
| 2  | Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah | 1.02.00        | -               | -           | -                       |
| 3  | Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah                                     | 1.03.00        | 30              | 3.62%       | 17.991.943,35           |
| 4  | Administrasi                                                                                                | 1.04.00        | 662             | 79.95%      | -                       |
| 5  | Indikasi tindak pidana                                                                                      | 1.05.00        | -               | -           | -                       |
|    | <b>Subtotal Kejadian</b>                                                                                    |                | <b>828</b>      | <b>100%</b> | <b>1.550.977.582,20</b> |

| No | Sub Kelompok Temuan*)                                                     | Kode           | Jumlah Kejadian | %           | Nilai (Rp)              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                         | 3              | 4               | 5           | 6                       |
|    | <b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>                        | <b>2.00.00</b> |                 |             |                         |
| 1  | Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan                     | 2.01.00        | -               | -           | -                       |
| 2  | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | 2.02.00        | -               | -           | -                       |
| 3  | Kelemahan struktur pengendalian intern                                    | 2.03.00        | -               | -           | -                       |
|    | <b>Subtotal Kejadian</b>                                                  |                | -               | -           | -                       |
|    | <b>Temuan 3 E</b>                                                         | <b>3.00.00</b> |                 |             |                         |
| 1  | Ketidakhematan/pemborosan/<br>Ketidakekonomisan                           | 3.01.00        | -               | -           | -                       |
| 2  | Ketidakefisienan                                                          | 3.02.00        | -               | -           | -                       |
| 3  | Ketidakefektifan                                                          | 3.03.00        | -               | -           | -                       |
|    | <b>Subtotal Kejadian</b>                                                  |                | -               | -           | -                       |
|    | <b>Jumlah Kejadian</b>                                                    |                | <b>828</b>      | <b>100%</b> | <b>1.550.977.582,20</b> |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / unit kerja di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan total temuan dapat dilihat bahwa temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan sebanyak 828 kejadian.

Persentase temuan terbanyak terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan, sehingga penekanan terhadap peraturan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebagai upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dan menekan terjadinya temuan pada pemeriksaan selanjutnya.

Permasalahan yang sering terjadi antara lain:

- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tertib;
- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tertib;
- Pengeluaran Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan;
- Inefisiensi belanja Material untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang berakibat terjadi pemborosan keuangan daerah/desa;
- Pelaksanaan pekerjaan sarana prasarana tidak sesuai dengan volume sesuai dengan RAB;

- f. Pajak atas belanja dana desa belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara;
- g. Belanja langsung tidak diyakini kebenarannya;
- h. Belanja tidak disertai dengan bukti dukung yang memadai sebagai lampiran LPJ.

Terhadap 828 temuan, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah memberikan 1.391 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut. Rekomendasi dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada Semester II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6**  
**Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Semester II Tahun 2024**

| No | Sub Kelompok Rekomendasi                                                                            | Jumlah Kejadian | %           | Nilai Temuan (Rp)       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                                   | 3               | 4           | 5                       |
| 1  | Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat.                                        | 147             | 10.57%      | 1.550.977.582,20        |
| 2  | Pengembalian barang kepada negara, daerah,BUMN/D, dan masyarakat                                    | -               | -           | -                       |
| 3  | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan      | -               | -           | -                       |
| 4  | Penghapusan barang milik negara/daerah                                                              | -               | -           | -                       |
| 5  | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian                                                         | -               | -           | -                       |
| 6  | Perbaikan laporan dan penertiban administrasi                                                       | 1.227           | 88.21%      | -                       |
| 7  | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan                                               | -               | -           | -                       |
| 8  | Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia pendukung system pengendali                            | -               | -           | -                       |
| 9  | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan.                                         | -               | -           | -                       |
| 10 | Perubahan atau perbaikan struktur organisasi.                                                       | -               | -           | -                       |
| 11 | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang. | 17              | 1.22%       | -                       |
| 12 | Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern.               | -               | -           | -                       |
| 13 | Pelaksanaan Sosialisasi                                                                             | -               | -           | -                       |
| 14 | Lain-lain                                                                                           | -               | -           | -                       |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                       | <b>1.391</b>    | <b>100%</b> | <b>1.550.977.582,20</b> |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang paling sering diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, antara lain:

1. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi 1.227 rekomendasi (88.21%);
2. Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat 147 rekomendasi (10.57%);
3. Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang 17 rekomendasi (1.22%).

Disamping itu, berdasarkan nilai temuan rekomendasi yang paling banyak diberikan adalah terkait Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat yaitu sebesar Rp1.550.977.582,20.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penertiban dan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Mengadakan Pembinaan dan fasilitasi terhadap SDM yang ada di Desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- Bupati agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa guna tertib administrasi;
- Untuk pengelolaan Dana BOS agar mengintensifkan rekonsiliasi data antara sekolah dengan Dinas P dan K;
- Meningkatkan fungsi verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dalam penatausahaan pertanggungjawaban keuangan APBD.

Adapun hasil kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester II Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

## **A. Audit**

### **1. Audit Kinerja**

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Dalam melaksanakan audit/pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 mengacu pada PKPT yang ditetapkan. PKPT tercantum dalam Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/519/14/Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024. Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah pada Semester II Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7**  
**Realisasi Audit Kinerja semester II Tahun 2024**

| No | Kegiatan Audit Kinerja | PKPT         |                          |                 |                          | Non PKPT        |                          |
|----|------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|    |                        | Target Audit |                          | Realisasi Audit |                          | Realisasi Audit |                          |
|    |                        | Jml KA       | Jml dana pengawasan (Rp) | Jml KA          | Jml dana pengawasan (Rp) | Jml KA          | Jml dana Pengawasan (Rp) |
| 1  | 2                      | 3            | 4                        | 5               | 6                        | 7               | 8                        |
| A  | Audit Kinerja          |              |                          |                 |                          | -               | -                        |
|    | - Audit Kinerja SKPD   | 5            | 28.173.500               | 5               | 18.664.550               |                 |                          |
|    | - Audit Kinerja Desa   | 5            | 28.107.200               | 5               | 28.107.200               |                 |                          |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>10</b>    | <b>56.280.700</b>        | <b>5</b>        | <b>46.771.750</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                 |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

Keterangan:

a. KA = Kegiatan Audit

b. OA = Objek Audit

c. Realisasi audit di isi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan

## 2. Audit Dengan Tujuan Tertentu

**Tabel 8**  
**Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit semester II Tahun 2024**

| No | Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu       | PKPT         |                          |                 |                          | Non PKPT        |                          |
|----|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
|    |                                             | Target Audit |                          | Realisasi Audit |                          | Realisasi Audit |                          |
|    |                                             | Jml KA       | Jml dana pengawasan (Rp) | Jml KA          | Jml dana pengawasan (Rp) | Jml KA          | Jml dana Pengawasan (Rp) |
| 1  | 2                                           | 3            | 4                        | 5               | 6                        | 7               | 8                        |
| A  | Audit Investigasi/ Pemeriksaan khusus/kasus | 12           | 92.836.500               | 12              | 72.157.050               | -               | -                        |
|    | <b>Jumlah</b>                               | <b>12</b>    | <b>92.836.500</b>        | <b>12</b>       | <b>72.157.050</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                 |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

Keterangan:

a. KA = Kegiatan Audit

b. OA = Objek Audit

c. Realisasi audit di isi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan

**Tabel 9**  
**Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus Semester II Tahun 2024**

| Keterangan                                                       | Jumlah |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                | 2      |
| Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus                                   | 12     |
| Jumlah Pemeriksaan Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) | 5      |
| % Pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)            | 41.67% |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

**Tabel 10**  
**Kode Etik dan Standar Audit yang digunakan**

| Kode etik dan standar audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dasar peraturan perundang-undangan                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                              |
| <p>1. Perilaku Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan tuntutan Organisasi</p> <p>a. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kab. Cilacap mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.</p> <p>b. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk memiliki/memanfaatkan semua keahlian/profesionalisme yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>c. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menjaga sifat objektif dalam tugas</p> <p>d. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk mempertahankan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>e. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara atau rahasia Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.</p> <p>f. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber daya yang ada secara inovatif untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan</p> | <p>Peraturan Bupati Cilacap Nomor 135 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.</p> |

| Kode etik dan standar audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dasar peraturan perundang-undangan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                  |
| g. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki pengabdian yang tinggi terhadap organisasinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| 2. Perilaku Aparat Inspektorat Dalam Berinteraksi Dengan sesama Aparat Inspektorat Kabupaten<br>a. Keharusan Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama Aparat Inspektorat Kabupaten.<br>b. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menjaga kebersamaan dan rasa kekeluargaan tanpa mengorbankan kepentingan organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| 3. Perilaku Aparat Inspektorat Kabupaten Dalam Berinteraksi Dengan pihak yang diperiksa/Auditan<br>a. Keharusan bagi Aparat Inspektorat untuk senantiasa menjaga penampilannya sesuai dengan tugas Aparat Inspektorat.<br>b. Keharusan Aparat Inspektorat Kabupaten untuk mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diperiksa/Auditan.<br>c. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dengan pihak yang diperiksa/auditan<br>d. Keharusan bagi Aparat Inspektorat menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diperiksa/auditan.<br>e. Keharusan bagi Aparat Inspektorat untuk tidak menerima imbalan/pemberian apapun diluar ketentuan yang berlaku<br><br><b>PEMANTAUAN KODE ETIK</b><br><br>Pelaksanaan Kode Etik Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dilakukan pemantauannya oleh masing-masing atasan Aparat Inspektorat Kabupaten secara berjenjang sesuai dengan tingkat kedudukannya. |                                    |

| Kode etik dan standar audit                                                                                                                                                                                                                                                       | Dasar peraturan perundang-undangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                  |
| <b>SANKSI ATAS KODE ETIK APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN</b><br><br>Setiap PNS selaku Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas pengawasan jika melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi yang mengacu kepada hasil rekomendasi Badan Kehormatan Profesi. |                                    |

## B. Reviu

Salah satu tugas APIP dalam melaksanakan perannya ialah dengan melakukan kegiatan reviu. Reviu merupakan penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan reviu pada semester II Tahun 2024 sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) kegiatan.

Kegiatan reviu yang paling sering dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yaitu Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan jumlah LHR terbit sebanyak 59. Kemudian Reviu Laporan Keuangan SKPD dengan jumlah LHR terbit sebanyak 10. Reviu Harga Perkiraan Sendiri sebanyak 8, Serta Reviu Kinerja dengan jumlah LHR terbit sebanyak 5.

Berikut merupakan rincian kegiatan reviu yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester II Tahun 2024:

**Tabel 11**  
**Jumlah Kegiatan Reviu pada semester II Tahun 2024**

| No | Kegiatan Reviu                | Realisasi | Prosentase |
|----|-------------------------------|-----------|------------|
| 1  | Reviu Laporan Realisasi DAU   | 13        | 10.07%     |
| 2  | Reviu DAK Fisik               | 59        | 45.73%     |
| 3  | Reviu SIM RS                  | 1         | 0.77%      |
| 4  | Reviu Laporan Keuangan SKPD   | 10        | 7.75%      |
| 5  | Reviu LPPD                    | 1         | 0.77%      |
| 6  | Reviu Kontrak Daftar Hitam    | 1         | 0.77%      |
| 7  | Reviu Harga Perkiraan Sendiri | 8         | 6.20%      |
| 8  | Reviu Dana Hibah              | 1         | 0.77%      |
| 9  | Reviu LKPD BUD                | 1         | 0.77%      |

|    |                                                                                                  |            |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 10 | Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas                                                           | 1          | 0.77%       |
| 11 | Reviu Kinerja                                                                                    | 5          | 3.87%       |
| 12 | Reviu Dokumen RKPD                                                                               | 1          | 0.77%       |
| 13 | Reviu THR dan Gaji-13 PPPK                                                                       | 1          | 0.77%       |
| 14 | Reviu RPJPD                                                                                      | 1          | 0.77%       |
| 15 | Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa                                              | 1          | 0.77%       |
| 16 | Reviu ASB                                                                                        | 1          | 0.77%       |
| 17 | Reviu Pembayaran Gaji PPPK                                                                       | 6          | 4.65%       |
| 18 | Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik | 2          | 1.55%       |
| 19 | Reviu Dokumen Perubahan RKPD                                                                     | 1          | 0.77%       |
| 20 | Reviu KUA PPAS                                                                                   | 1          | 0.77%       |
| 21 | Reviu SSH                                                                                        | 1          | 0.77%       |
| 22 | Reviu Perbaikan dan Pengganti Data Hasil Verifikasi Lapangan Inpres Percepatan ald               | 1          | 0.77%       |
| 23 | Reviu Manajemen ASN dan Benturan Kepentingan                                                     | 1          | 0.77%       |
| 24 | Reviu Penghapusan Piutang BPHTB                                                                  | 1          | 0.77%       |
| 25 | Reviu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan                                                          | 1          | 0.77%       |
| 26 | Reviu APIP Atas Pemenuhan TKDN 10 Kontrak Pbj (Utama 5 Alkes dan 5 Elektronik)                   | 1          | 0.77%       |
| 27 | Reviu atas Kebenaran Jumlah Siswa ditampung pada Penerimaan PPDB                                 | 5          | 3.87%       |
| 28 | Reviu SPJ Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah                                                     | 1          | 0.77%       |
| 29 | Reviu RKA                                                                                        | 1          | 0.77%       |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                                    | <b>129</b> | <b>100%</b> |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

### C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada semester II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan evaluasi sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) Kegiatan Evaluasi sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi AKIP diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas

instansi/unit kerja pemerintah. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh OPD, Kecamatan dan BLUD yang ada di Kabupaten Cilacap dengan rincian nilai SAKIP Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di OPD Kabupaten Cilacap**

| No | Nama Perangkat Daerah | Nilai 2023 | Predikat |
|----|-----------------------|------------|----------|
| 1  | Sekretariat Daerah    | 82.61      | A        |
| 2  | Sekretariat DPRD      | 77.70      | BB       |
| 3  | Inspektorat Daerah    | 82.40      | A        |
| 4  | BKPPD                 | 82.15      | A        |
| 5  | BAPPEDA               | 82.14      | A        |
| 6  | BPPKAD                | 80.20      | A        |
| 7  | Bakesbangpol          | 78.10      | BB       |
| 8  | Satpol PP             | 76.60      | BB       |
| 9  | BPBD                  | 75.75      | BB       |
| 10 | Dinas Kesehatan       | 83.00      | A        |
| 11 | Dinas P dan K         | 82.70      | A        |
| 12 | Dinas Perikanan       | 81.65      | A        |
| 13 | Dinas Sosial          | 81.25      | A        |
| 14 | Disporapar            | 80.95      | A        |
| 15 | DPUPR                 | 80.75      | A        |
| 16 | Dinas Pertanian       | 80.70      | A        |
| 17 | Disdukcapil           | 80.60      | A        |
| 18 | Dinas Arpus           | 80.60      | A        |
| 19 | Disnakerin            | 80.60      | A        |
| 20 | DPKUKM                | 80.60      | A        |
| 21 | Dinas Perhubungan     | 80.45      | A        |
| 22 | Dinas KB, PP dan PA   | 79.35      | BB       |
| 23 | Dispabun              | 79.05      | BB       |
| 24 | Dispermades           | 78.65      | BB       |

| No | Nama Perangkat Daerah     | Nilai 2023 | Predikat |
|----|---------------------------|------------|----------|
| 25 | Diskominfo                | 77.75      | BB       |
| 26 | Disperkimta               | 77.15      | BB       |
| 27 | Dinas Lingkungan Hidup    | 76.65      | BB       |
| 28 | DPMPTSP                   | 76.00      | BB       |
| 29 | Dinas PSDA                | 75.15      | BB       |
| 30 | RSUD Cilacap              | 78.00      | BB       |
| 31 | RSUD Majenang             | 77.25      | BB       |
| 32 | Kecamatan Bantarsari      | 81.80      | A        |
| 33 | Kecamatan Kedungreja      | 81.50      | A        |
| 34 | Kecamatan Wanareja        | 81.35      | A        |
| 35 | Kecamatan Adipala         | 80.80      | A        |
| 36 | Kecamatan Majenang        | 80.60      | A        |
| 37 | Kecamatan Kawunganten     | 80.35      | A        |
| 38 | Kecamatan Sidareja        | 80.25      | A        |
| 39 | Kecamatan Cilacap Tengah  | 78.95      | BB       |
| 40 | Kecamatan Sampang         | 78.85      | BB       |
| 41 | Kecamatan Jeruklegi       | 78.70      | BB       |
| 42 | Kecamatan Cilacap Utara   | 78.10      | BB       |
| 43 | Kecamatan Patimuan        | 77.90      | BB       |
| 44 | Kecamatan Nusawungu       | 77.75      | BB       |
| 45 | Kecamatan Kesugihan       | 77.40      | BB       |
| 46 | Kecamatan Cilacap Selatan | 77.10      | BB       |
| 47 | Kecamatan Dayeuhluhur     | 76.95      | BB       |
| 48 | Kecamatan Cimanggu        | 76.45      | BB       |
| 49 | Kecamatan Kroya           | 76.40      | BB       |
| 50 | Kecamatan Maos            | 76.30      | BB       |
| 51 | Kecamatan Gandrungmangu   | 76.20      | BB       |
| 52 | Kecamatan Cipari          | 75.80      | BB       |
| 53 | Kecamatan Binangun        | 75.65      | BB       |
| 54 | Kecamatan Karangpucung    | 75.30      | BB       |
| 55 | Kecamatan Kampunglaut     | 75.20      | BB       |

\*Data Per 31 Desember 2024

## 2. Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah. Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan

gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Tujuan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan PUG dan PPRG telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemui

Semester I & II Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Kecamatan Sampang, Kecamatan Kawunganten, Kecamatan Sidareja, dan Kecamatan Jeruklegi.

#### D. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada semester II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pemantauan sebanyak 268 (Dua ratus enam puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Kegiatan Pemantauan/Monitoring pada Semester II Tahun 2024**

| No            | Kegiatan Pemantauan/Monitoring                                 | Realisasi  | Prosentase  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1             | Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD                  | 2          | 0.75%       |
| 2             | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi         | 1          | 0.37%       |
| 3             | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah   | 261        | 97.39%      |
| 4             | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi | 2          | 0.75%       |
| 5             | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI               | 2          | 0.75%       |
| <b>Jumlah</b> |                                                                | <b>268</b> | <b>100%</b> |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

Selain kegiatan pemantauan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap juga melaksanakan pemantauan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang telah disajikan dalam bentuk matriks tindaklanjut yang terdapat dalam Lampiran I.

## E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pada semester II Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sebanyak 107 (Seratus tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 14**  
**Kegiatan Pengawasan Lainnya semester II Tahun 2024**

| No            | Kegiatan Pemantauan/Monitoring                                                               | Realisasi  | Prosentase     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1             | Probity Audit Tahap Perencanaan                                                              | 10         | 9.34%          |
| 2             | Verifikasi Data by Name by Address (BNBA)                                                    | 2          | 1.87%          |
| 3             | Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                     | 11         | 10.28%         |
| 4             | Pengumpulan Bahan dan Keterangan Atas Pengaduan Masyarakat                                   | 2          | 1.87%          |
| 5             | Pengawasan Pasca Pelaksanaan PPDB                                                            | 9          | 8.41%          |
| 6             | Pengawasan Pengadaan ASN                                                                     | 1          | 0.93%          |
| 7             | Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP                                                           | 6          | 5.60%          |
| 8             | Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi                                              | 5          | 4.67%          |
| 9             | Opname Kas Persediaan                                                                        | 44         | 41.12%         |
| 10            | Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On going) Reformasi Birokrasi         | 2          | 1.87%          |
| 11            | Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa Anti Korupsi) | 7          | 6.54%          |
| 12            | Asistensi Manajemen Risiko                                                                   | 6          | 5.60%          |
| 13            | Pengawasan Peningkatan Produksi Padi                                                         | 2          | 1.87%          |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                              | <b>107</b> | <b>100.00%</b> |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

Selain kegiatan pengawasan lainnya yang berdasarkan PKPT diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap juga mempunyai tambahan tugas pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 15**  
**Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya Semester II Tahun 2024**

| No | Jenis Kegiatan                                             | Rencana     |           | Realisasi   |           | Capaian  |          |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|
|    |                                                            | Anggaran    | Kuantitas | Anggaran    | Kuantitas | Angg (%) | Kuan (%) |
| 1  | Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan (LARWASDA)        | 132.973.100 | 1         | 122.671.150 | 1         | 92.25%   | 100%     |
| 2  | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (BPK dan APIP) | 113.668.500 | 150       | 72.369.300  | 265       | 63.67%   | 177%     |

|               |                                                                   |                      |            |                      |            |        |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------|------|
| 3             | Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah                                | 133.900.000          | 1          | 101.257.300          | 1          | 75.62% | 100% |
| 4             | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH (IHPS)                     | 8.193.700            | 2          | 7.480.900            | 2          | 91.30% | 100% |
| 5             | Pendampingan / Evaluasi Manajemen Resiko pada SKPD                | 244.506.800          | 10         | 206.332.550          | 10         | 84.39% | 100% |
| 6             | Penilaian Maturitas SPIP dan Penilaian Kapabilitas APIP           | 55.778.300           | 10         | 29.019.550           | 10         | 52.02% | 100% |
| 7             | Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa             | 260.755.400          | 21         | 222.347.700          | 21         | 85.27% | 100% |
| 8             | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)                     | 31.442.400           | 4          | 27.508.800           | 4          | 87.49% | 100% |
| 9             | Fasilitasi Sosialisasi Saber Pungli                               | 695.585.300          | 11         | 682.450.300          | 11         | 98.11% | 100% |
| 10            | Koordinasi POLRES-KEJAKSAAN                                       | 249.108.000          | 24         | 240.334.450          | 24         | 96.48% | 100% |
| 11            | Monitoring, Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Aksi Korsupgah KPK | 36.892.000           | 4          | 23.524.000           | 4          | 63.76% | 100% |
| 12            | Survey Penilaian Integritas                                       | 47.698.100           | 52         | 45.731.050           | 52         | 95.88% | 100% |
| <b>Jumlah</b> |                                                                   | <b>2.010.501.600</b> | <b>290</b> | <b>1.781.027.050</b> | <b>405</b> |        |      |

\* Akumulasi data Semester I dan II Tahun 2024

### **BAB III**

#### **PEMANTAUAN TINDAK LANJUT**

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri dari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut antara lain dengan cara mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut dilakukan dengan datang langsung ke Objek pemeriksaan/Auditan dan melakukan koordinasi untuk penyelesaian tindak lanjut. Penugasan tersebut untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Kegiatan pemutakhiran data atau pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan telah dilaksanakan 2 (dua) kali pada bulan Juni 2024 dan pada bulan Desember 2024 yang diselenggarakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan 2 (dua) kali pada bulan Mei 2024 dan bulan September 2024 bertempat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir Tahun 2024 menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya, dengan status dalam proses tindak lanjut. Hal tersebut antara lain disebabkan karena terdapat rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut lama, temuan sulit untuk ditindaklanjuti, dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT yang baru terbit, sehingga sampai dengan akhir Semester II Tahun 2024 belum selesai tindak lanjutnya.

#### **A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI**

Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s/d 2024 adalah sebanyak 1.008 rekomendasi. Hasil pemantauan sampai dengan akhir Tahun 2024, terdapat 51 (Lima puluh satu) rekomendasi dalam proses tindak lanjut merupakan temuan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- LKPD Tahun 2004 sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2006 sebanyak 3 rekomendasi;
- LHP Belanja Daerah Tahun 2007 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2008 sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2009 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2011 sebanyak 6 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2013 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2014 sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2015 dan LHP Manajemen Aset sebanyak 12 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2016 dan LHP Kinerja UMKM sebanyak 6 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2017 dan LHP Kinerja Desa sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2018 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2020 sebanyak 4 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2022 sebanyak 3 rekomendasi.
- LKPD Tahun 2023 sebanyak 5 rekomendasi.

#### **B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP**

- 1) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.

Status temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap sampai dengan semester II Tahun 2024 terdapat 828 temuan dan 1.391 rekomendasi, sampai dengan semester II 2024 dari 1.391 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.358 rekomendasi dan dalam proses sebanyak 33 rekomendasi.

- 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

Pada Semester I dan II Tahun 2024 terdapat pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Cilacap terkait Hasil Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, terdapat 2 temuan, 13 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti.

## BAB IV

### HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat yang ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap meliputi pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Bupati Cilacap, informasi dari surat aduan, media sosial, permintaan OPD maupun limpahan dari instansi vertikal lainnya.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menangani kasus pengaduan masyarakat sebanyak 12 aduan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 16**  
**Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat**

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber aduan          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Audit Investigasi pada Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan (Terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan)                                                                                                                                 | Limpahan Kejaksaan    |
| 2  | Audit Investigasi Dugaan Penyelewengan Bonus atas Prestasi pada BLUD UPTD Puskesmas se Kabupaten Cilacap Tahun 2023                                                                                                                                                                     | Limpahan Kejaksaan    |
| 3  | Audit Investigasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Terkait dugaan tindak pidana korupsi paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN Bumireja 02 Kecamatan Kedungreja Tahun Anggaran 2023)                                                                                         | Limpahan Kepolisian   |
| 4  | Audit Investigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Terkait dugaan penyimpangan pengelolaan alat berat pada UPTD Perbengkelan)                                                                                                                                              | Limpahan Kejaksaan    |
| 5  | Pemeriksaan Khusus pada SDN Sarwadadi 04 Kecamatan Kawunganten (Terkait dugaan pungutan biaya perpindahan Kelas 6)                                                                                                                                                                      | Limpahan Ombudsman    |
| 6  | PDTT atas Dugaan Tindak Pidana Pungutan Liar Sumbangan Wali Murid SD & SMP pada SMP Negeri Satu Atap Bantarsari Kec.Bantarsari Kab.Cilacap Tahun Anggaran 2023                                                                                                                          | Limpahan Kepolisian   |
| 7  | Pemeriksaan Khusus Kepala Desa pada Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kab.Cilacap                                                                                                                                                                                                         | Surat Aduan/Lapor Bup |
| 8  | Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Pungutan Seragam Sekolah pada SMP Negeri 2 Majenang                                                                                                                                                                                                      | Limpahan Ombudsman    |
| 9  | Audit Investigasi terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa Slarang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 dan Pengelolaan Dana CSR dari PLTU Karangandri Cilacap serta Pungutan Biaya Pologoro pada Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. | Limpahan Kepolisian   |
| 10 | Audit Investigasi terkait Penyimpangan pada Perusda Grafika Indah (Penyertaan Modal Tahun 2019)                                                                                                                                                                                         | Limpahan Kejaksaan    |
| 11 | Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Pungli pada Penerimaan Buku Pelajaran pada SD Negeri Tritih Lor 01 Cilacap                                                                                                                                                                  | Limpahan Kepolisian   |
| 12 | Audit Investigasi Dugaan Pungutan Liar pada LKP Mutiara Jeruklegi Kabupaten Cilacap                                                                                                                                                                                                     | Limpahan Kepolisian   |

\*Data Akumulasi Semester I dan II Tahun 2024

Berkaitan dengan proses penyelesaian pengaduan masyarakat, dapat dilihat pada lampiran 3.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pemantauan monitoring dan kegiatan penunjang pengawasan lainnya.
2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester I dan II Tahun 2024 sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Audit/Pemeriksaan sebanyak 88 (Delapan puluh delapan) kegiatan;
  - b. Kegiatan Reviu dilaksanakan sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) kegiatan;
  - c. Kegiatan Evaluasi dilaksanakan sebanyak 59 (Lima puluh Sembilan) kegiatan;
  - d. Kegiatan Pemantauan dilaksanakan sebanyak 268 (Dua ratus enam puluh delapan) kegiatan;
  - e. Kegiatan Pengawasan Lainnya sebanyak 107 (Seratus tujuh) kegiatan.
3. Jumlah temuan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester I dan II Tahun 2024 sebanyak 828 (Delapan ratus dua puluh delapan) berupa temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Adapun jumlah rekomendasi sebanyak 1.391 (Seribu tiga ratus sembilan puluh satu) rekomendasi, dengan prosentase terbesar adalah rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi sebanyak 1.227 (Seribu dua ratus dua puluh tujuh) rekomendasi dengan prosentase sebesar 88.21%, diikuti penyetoran uang ke Kas Negara/Daerah/maupun Kas Desa/masyarakat sebanyak 147 (Seratus empat puluh tujuh) rekomendasi dengan prosentase sebesar 10.57% serta 17 (Tujuh belas) rekomendasi Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang atau sebesar 1.22%.
4. Selama semester I dan II Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menangani kasus pengaduan masyarakat sebanyak 12 aduan masyarakat dan kasus tersebut telah selesai ditangani.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP th 2005 s.d Semester II Tahun 2024, masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya dengan rincian sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah terdapat 452 (Empat ratus lima puluh dua) temuan dan 1.008 (Seribu delapan) rekomendasi. Status Tindak Lanjut selesai sesuai Rekomendasi (S) sebanyak 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) rekomendasi, Belum sesuai rekomendasi (D)

sebanyak 51 (Lima puluh satu) rekomendasi . Prosentase Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan Desember 2024 sebesar 94,94%.

## **B. Hambatan**

### **1. Hambatan Internal:**

- a. Belum optimalnya kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang bersifat spesifik dimasing-masing Inspektur Pembantu.
- b. Belum optimalnya sistem kerja dengan konsep *agile* di Inspektorat.

### **2. Hambatan Eksternal:**

- a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan.
- b. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat Daerah sehingga tidak semua objek pemeriksaan dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
- c. Belum efektifnya pelaksanaan SPIP/MR sesuai yang diharapkan sehingga berakibat terjadinya temuan berulang dalam pelaksanaan kegiatan OPD.

## **C. Saran / Rekomendasi**

1. - Untuk menambah kompetensi para pejabat fungsional Auditor dan PPUPD yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap perlu adanya peningkatan kemampuan baik melalui Bimtek, PKS maupun pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat baik Diklat Fungsional maupun Diklat Substansi.
- Mengoptimalkan sistem kerja *agile* di Inspektorat antara personil di Sekretariat dengan Irban ataupun antar Irban sehingga tercipta *teamwork* yang baik dan optimal.
2. Kepada setiap jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus meningkatkan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP dan MR) secara berjenjang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk mengoptimalkan fungsi monitoring kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi verifikasi terhadap pengelolaan keuangan di desa serta perlu disusun pedoman teknis monitoring dan evaluasi dari Dispermades selaku Dinas Teknis, sehingga ada kejelasan maksud, tujuan, sasaran serta hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan fungsi tersebut.
4. Untuk pengelolaan dana BOS diperlukan adanya penambahan SDM pada dinas teknis sebagai pengampu atas permasalahan yang terjadi di lapangan

dikarenakan sebagian besar pengelola BOS di sekolah adalah guru yang tidak memiliki dasar pengetahuan akuntansi.

5. Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan baik di OPD maupun Desa perlu terus dilakukan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan fasilitasi dalam hal pengelolaan keuangan sehingga tidak terjadi temuan berulang dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *Good Government* dan *Clean Governance* dapat terwujud.
6. Perlunya penggunaan sistem aplikasi yang khusus menangani kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat dimonitor secara tepat dan akurat.

Cilacap, 24 Februari 2025

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**



**ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 199001 1 001

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA  
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
Posisi Per : 31 Desember 2024

| Kode | HAPSEM                                     | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN |       |                  | SELESAI DITINDAKLANJUTI |       |                  | TEMUAN DALAM PROSES |       |            | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI |       |            | KETERANGAN |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-------------------------|-------|------------------|---------------------|-------|------------|------------------------------|-------|------------|------------|
|      | Lingkup Pemeriksaan<br>Kelompok Temuan     | JUMLAH                   |       | Nilai (Rp)       | JUMLAH                  |       | Nilai (Rp)       | JUMLAH              |       | Nilai (Rp) | JUMLAH                       |       | Nilai (Rp) |            |
|      |                                            | Temuan                   | Saran |                  | Temuan                  | Saran |                  | Temuan              | Saran |            | Temuan                       | Saran |            |            |
| 1    | 2                                          | 3                        | 4     | 5                | 6                       | 7     | 8                | 9                   | 10    | 11         | 12                           | 13    | 14         | 15         |
| A    | REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I dan II TA 2024 |                          |       |                  |                         |       |                  |                     |       |            |                              |       |            |            |
| 1    | Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan   | 828                      | 1.391 | 1.550.977.582,20 | 782                     | 1.358 | 1.550.977.582,20 | 16                  | 33    | 0.00       | 0                            | 0     | 0.00       |            |
| 2    | Temuan Sistem Pengendalian Intern          | 0                        | 0     | 0.00             | 0                       | 0     | 0.00             | 0                   | 0     | 0.00       | 0                            | 0     | 0.00       |            |
| 3    | Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)  | 0                        | 0     | 0.00             | 0                       | 0     | 0.00             | 0                   | 0     | 0.00       | 0                            | 0     | 0.00       |            |
|      | Jumlah                                     | 828                      | 1.391 | 1.550.977.582,20 | 782                     | 1.358 | 1.550.977.582,20 | 16                  | 33    | 0.00       | 0                            | 0     | 0.00       |            |

\*Data Akumulasi semester I dan semester II Tahun 2024

Cilacap, 24 Februari 2025

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN CILACAP



ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681027 199001 1 001

| Kode     | HAPSEM                                          | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN |              |                              | SELESAI DITINDAKLANJUTI |                          | TEMUAN DALAM PROSES |                         | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI |          | KET |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------|-----|
|          | Lingkup Pemeriksaan                             | Jml                      | Jml          | Nilai                        | Jml                     | Nilai                    | Jml                 | Nilai                   | Jml                          | Nilai    |     |
|          | Kelompok Temuan                                 | Temuan                   | Saran        | (Rp)                         | Saran                   | (Rp)                     | Saran               | (Rp)                    | Saran                        | (Rp)     |     |
|          | PDAM TA 2005                                    | 3                        | 3            | 40,046,675.03                | 3                       | 40,046,675.03            | 0                   | -                       | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (T)</b>                           | <b>16</b>                | <b>23</b>    | <b>1,736,093,621.13</b>      | <b>23</b>               | <b>1,736,093,621.13</b>  | <b>0</b>            | <b>-</b>                | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>U</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2004</b> |                          |              |                              |                         |                          |                     |                         |                              |          |     |
|          | Laporan Keuangan Daerah Tahun 2004              | 18                       | 31           | 4,007,544,913.69             | 29                      | 915,228,062.69           | 2                   | 3,092,316,851.00        | 0                            | -        |     |
|          | PDAM TA 2004                                    | 3                        | 4            | -                            | 4                       | -                        | 0                   | -                       | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (U)</b>                           | <b>21</b>                | <b>35</b>    | <b>4,007,544,913.69</b>      | <b>33</b>               | <b>915,228,062.69</b>    | <b>2</b>            | <b>3,092,316,851.00</b> | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
|          | <b>TOTAL</b>                                    | <b>452</b>               | <b>1.008</b> | <b>IDR 59.119.810.193,96</b> | <b>957</b>              | <b>50.523.526.151,82</b> | <b>51</b>           | <b>5.003.789.364,00</b> | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |

Cilacap, 24 Februari 2025

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

**ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 199001 1 001

**LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I DAN II TAHUN 2024**  
**PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
 Posisi Per : 31 Desember 2024

| No | Tanggal Pemeriksaan              | Sumber Aduan          | No. Surat                       | Perihal                             | Hasil          | Action  |
|----|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1  | 04 Maret-19 April 2024           | Limpahan Kejaksaan    | R-1379/M.3.17/Dek.1/09/2023     | Penyalahgunaan pengelolaan keuangan | Terbukti       | Selesai |
| 2  | 04 Maret-22 Maret 2024           | Limpahan Kejaksaan    | B-454/M.3.17/Fd.1/02/2024       | Penyalahgunaan pengelolaan keuangan | Tidak terbukti | Selesai |
| 3  | 06 Mei-17 Mei 2024               | Limpahan Kepolisian   | B/138/III/RES.3.3/2024/Reskrim  | Penyalahgunaan pengelolaan keuangan | Terbukti       | Selesai |
| 4  | 27 Juni-05 Juli 2024             | Limpahan Kejaksaan    | B-1741/M.3.17/Fd.2/06/2024      | Penyalahgunaan pengelolaan aset     | Terbukti       | Selesai |
| 5  | 08 Juni-11 Juni 2024             | Limpahan Ombudsman    | -                               | Dugaan pungutan liar                | Tidak terbukti | Selesai |
| 6  | 19 Juli - 31 Juli 2024           | Limpahan Kepolisian   | B/185/III/RES.1.24/2024/Reskrim | Dugaan pungutan liar                | Tidak terbukti | Selesai |
| 7  | 08 Juli - 17 Juli 2024           | Surat Aduan/Lapor Bup | 700/173/60                      | Penyalahgunaan wewenang             | Terbukti       | Selesai |
| 8  | 22 Juli - 25 Juli 2024           | Limpahan Ombudsman    | -                               | Dugaan pungutan liar                | Tidak terbukti | Selesai |
| 9  | 09 September - 23 September 2024 | Limpahan Kepolisian   | B/508/VIII/RES.3./2024/Reskrim  | Dugaan Tindak Pidana Korupsi        | Terbukti       | Selesai |
| 10 | 09 September - 23 September 2024 | Limpahan Kejaksaan    | B-2366/M.3.17/Fd.2/08/2024      | Penyalahgunaan pengelolaan keuangan | Terbukti       | Selesai |

| No | Tanggal Pemeriksaan                      | Sumber Aduan           | No. Surat                    | Perihal              | Hasil          | Action  |
|----|------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| 11 | 01 Oktober - 09<br>Oktober 2024          | Limpahan<br>Kepolisian | B/556/IX/RES.3./2024/Reskrim | Dugaan pungutan liar | Tidak terbukti | Selesai |
| 12 | 25 November 2024 s.d<br>06 Desember 2024 | Limpahan<br>Kepolisian | B/983/X/RES.3.3/2024/Reskrim | Dugaan pungutan liar | Tidak terbukti | Selesai |

\*Data Akumulasi Semester I dan II Tahun 2024

Cilacap, 24 Februari 2025

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**



**ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 199001 1 001

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTNYA**  
**HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI**  
**BERDASARKAN APLIKASI SIP-TL BPK-RI**

| Kode     | HAPSEM                                                                           | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN |           |                         | SELESAI DITINDAKLANJUTI |                         | TEMUAN DALAM PROSES |                      | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI |          | KET |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|-----|
|          | Lingkup Pemeriksaan                                                              | Jml                      | Jml       | Nilai                   | Jml                     | Nilai                   | Jml                 | Nilai                | Jml                          | Nilai    |     |
|          | Kelompok Temuan                                                                  | Temuan                   | Saran     | (Rp)                    | Saran                   | (Rp)                    | Saran               | (Rp)                 | Saran                        | (Rp)     |     |
| 1        | 2                                                                                | 3                        | 4         | 5                       | 6                       | 7                       | 8                   | 9                    | 10                           | 11       | 12  |
| <b>A</b> | <b>REKAPITULASI PEMERIKSAAN LKPD 2023</b>                                        |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          | LHP LKPD Tahun 2023                                                              | 17                       | 25        | 1.607.541.497,00        | 20                      | 1.607.541.497,00        | 5                   | -                    | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (A)</b>                                                            | <b>17</b>                | <b>25</b> | <b>1.607.541.497,00</b> | <b>20</b>               | <b>1.607.541.497,00</b> | <b>5</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>B</b> | <b>REKAPITULASI PEMERIKSAAN LKPD 2022</b>                                        |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          | LHP LKPD Tahun 2022 dan LHP Kepatuhan belanja infrastruktur Tahun 2023           | 11                       | 19        | 3,592,494,678.14        | 19                      | 3,592,494,678.14        | -                   | -                    | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (B)</b>                                                            | <b>11</b>                | <b>19</b> | <b>3,592,494,678.14</b> | <b>19</b>               | <b>3,592,494,678.14</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>C</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2021</b>                                  |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          | Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan                                              |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          | Temuan SPI                                                                       |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          | Lain-lain                                                                        | 8                        | 22        | 843,871,000.00          | 22                      | -                       | -                   | -                    | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (C)</b>                                                            | <b>8</b>                 | <b>22</b> | <b>843,871,000.00</b>   | <b>22</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>D</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2020</b>                                  |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          |                                                                                  |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          | Lain-lain                                                                        | 14                       | 30        | 392,656,274.00          | 26                      | 346.501.144,32          | 4                   | 46.155.130,00        | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (D)</b>                                                            | <b>14</b>                | <b>30</b> | <b>392,656,274.00</b>   | <b>26</b>               | <b>346.501.144,32</b>   | <b>4</b>            | <b>46.155.130,00</b> | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>E</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENANGANAN COVID – 19 TAHUN 2020</b> |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          |                                                                                  |                          |           |                         |                         |                         |                     |                      |                              |          |     |
|          | Lain-lain                                                                        | 8                        | 15        | -                       | 15                      | -                       | -                   | -                    | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (E)</b>                                                            | <b>8</b>                 | <b>15</b> | <b>-</b>                | <b>15</b>               |                         |                     | <b>-</b>             | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |

| Kode | HAPSEM                                          | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN |       |                  | SELESAI DITINDAKLANJUTI |                  | TEMUAN DALAM PROSES |                | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI |       | KET |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------|-----|
|      | Lingkup Pemeriksaan                             | Jml                      | Jml   | Nilai            | Jml                     | Nilai            | Jml                 | Nilai          | Jml                          | Nilai |     |
|      | Kelompok Temuan                                 | Temuan                   | Saran | (Rp)             | Saran                   | (Rp)             | Saran               | (Rp)           | Saran                        | (Rp)  |     |
| F    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2019        |                          |       |                  |                         |                  |                     |                |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan             | 3                        | 3     | 621,130,000.00   | 3                       | 621,130,000.00   | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Temuan SPI                                      | 9                        | 11    | -                | 11                      | -                | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (F)                                  | 20                       | 29    | 621,130,000.00   | 29                      | 621,130,000.00   | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
| G    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2018        |                          |       |                  |                         |                  |                     |                |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan             | 8                        | 23    | 778,192,481.12   | 22                      | 778,192,481.12   | 1                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Temuan SPI                                      | 5                        | 19    | -                | 19                      | -                | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Infrastruktur                                   | 3                        | 4     | 2,982,508,650.00 | 4                       | 2,982,508,650.00 | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (G)                                  | 16                       | 46    | 3,760,701,131.12 | 45                      | 3,760,701,131.12 | 1                   | -              | 0                            | -     |     |
| H    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2017        |                          |       |                  |                         |                  |                     |                |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan             | 7                        | 14    | -                | 14                      | -                | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Temuan SPI                                      | 12                       | 32    | 736,676,815.02   | 32                      | 127.356.300,00   | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Dana Desa 2015-2018                             | 8                        | 15    | -                | 13                      | -                | 2                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (H)                                  | 27                       | 61    | 736,676,815.02   | 59                      | 127.356.300,00   | 2                   | -              | 0                            | -     |     |
| I    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2016        |                          |       |                  |                         |                  |                     |                |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan             | 8                        | 23    | -                | 22                      | -                | 1                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Temuan SPI                                      | 11                       | 29    | 2.268.210.231,71 | 26                      | 1.773.267.731,71 | 3                   | 494.942.500,00 | 0                            | -     |     |
|      | UMKM 2016-2017                                  | 14                       | 34    | -                | 32                      | -                | 2                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (I)                                  | 33                       | 86    | 2.268.210.231,71 | 80                      | 1.773.267.731,71 | 6                   | 494.942.500,00 | 0                            | -     |     |
| J    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2015        |                          |       |                  |                         |                  |                     |                |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan | 4                        | 13    | 287,249,193.60   | 10                      | 287,249,193.60   | 3                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Temuan Kelemahan SPI                            | 10                       | 29    | -                | 29                      | -                | 0                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Manajemen Aset                                  | 4                        | 20    | -                | 11                      | -                | 9                   | -              | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (J)                                  | 18                       | 62    | 287,249,193.60   | 50                      | 287,249,193.60   | 12                  | -              | 0                            | -     |     |

| Kode | HAPSEM                                          | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN |       |                  | SELESAI DITINDAKLANJUTI |                  | TEMUAN DALAM PROSES |              | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI |       | KET |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-------|-----|
|      | Lingkup Pemeriksaan                             | Jml                      | Jml   | Nilai            | Jml                     | Nilai            | Jml                 | Nilai        | Jml                          | Nilai |     |
|      | Kelompok Temuan                                 | Temuan                   | Saran | (Rp)             | Saran                   | (Rp)             | Saran               | (Rp)         | Saran                        | (Rp)  |     |
| K    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2014        |                          |       |                  |                         |                  |                     |              |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan | 2                        | 5     | 947,502,571.24   | 4                       | -                | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Temuan Kelemahan SPI                            | 2                        | 10    | -                | 10                      | -                | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Lain-lain                                       | 7                        | 15    | -                | 14                      | -                | 2                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (K)                                  | 11                       | 30    | 947,502,571.24   | 28                      | -                | 2                   | -            | 0                            | -     |     |
| L    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2013        |                          |       |                  |                         |                  |                     |              |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan | 7                        | 21    | 822,758,562.00   | 21                      | 822,758,562.00   | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Temuan Kelemahan SPI                            | 9                        | 29    | -                | 28                      | -                | 1                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | OPS RSUD Cilacap                                | 12                       | 19    | -                | 19                      | -                | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (L)                                  | 28                       | 69    | 822,758,562.00   | 68                      | 822,758,562.00   | 1                   | -            | 0                            | -     |     |
| M    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2012        |                          |       |                  |                         |                  |                     |              |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan |                          |       |                  |                         |                  |                     |              |                              |       |     |
|      | Temuan Kelemahan SPI                            |                          |       |                  |                         |                  |                     |              |                              |       |     |
|      | Lain-lain                                       | 14                       | 37    | 2,984,382,581.00 | 37                      | 2,984,382,581.32 | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | HIBAH 2012-2013                                 | 13                       | 23    | 257,041,800.00   | 23                      | 257,041,800.00   | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (M)                                  | 27                       | 60    | 3,241,424,381.00 | 60                      | 3,241,424,381.00 | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
| N    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2011        |                          |       |                  |                         |                  |                     |              |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan | 6                        | 12    | 1,216,097,715.32 | 7                       | 1,216,097,715.32 | 5                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Temuan Kelemahan SPI                            | 16                       | 34    | 990,561,862.00   | 34                      | 990,561,862.00   | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | PAD TA 2011-2012                                | 16                       | 61    | 27,272,707.00    | 60                      | 18,022,707.00    | 1                   | 9,250,000.00 | 0                            | -     |     |
|      | Sub Jumlah (N)                                  | 38                       | 107   | 2,364,886,283.32 | 101                     | 1,614,834,113.32 | 6                   | 9,250,000.00 | 0                            | -     |     |
| O    | REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2010        |                          |       |                  |                         |                  |                     |              |                              |       |     |
|      | Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan | 20                       | 34    | 441,804,285.04   | 34                      | 441,804,285.04   | 0                   | -            | 0                            | -     |     |
|      | Temuan Kelemahan SPI                            | 10                       | 19    | -                | 19                      | -                | 0                   | -            | 0                            | -     |     |

| Kode     | HAPSEM                                          | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN |            |                          | SELESAI DITINDAKLANJUTI |                          | TEMUAN DALAM PROSES |                       | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI |          | KET |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------|-----|
|          | Lingkup Pemeriksaan                             | Jml                      | Jml        | Nilai                    | Jml                     | Nilai                    | Jml                 | Nilai                 | Jml                          | Nilai    |     |
|          | Kelompok Temuan                                 | Temuan                   | Saran      | (Rp)                     | Saran                   | (Rp)                     | Saran               | (Rp)                  | Saran                        | (Rp)     |     |
|          | DAK 2009-2010                                   | 21                       | 51         | 1,974,034,799.01         | 51                      | 1,974,034,799.01         | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (O)</b>                           | <b>51</b>                | <b>104</b> | <b>2,415,839,084.05</b>  | <b>104</b>              | <b>2,415,839,084.05</b>  | <b>0</b>            | <b>-</b>              | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>P</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2009</b> |                          |            |                          |                         |                          |                     |                       |                              |          |     |
|          | Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan           | 14                       | 24         | 7,731,650,028.00         | 23                      | 7,731,650,028.00         | 1                   | 180,347,510.00        | 0                            | -        |     |
|          | Temuan Kelemahan SPI                            | 6                        | 12         | -                        | 12                      | -                        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (P)</b>                           | <b>20</b>                | <b>36</b>  | <b>7,731,650,028.00</b>  | <b>35</b>               | <b>7,731,650,028.00</b>  | <b>1</b>            | <b>180,347,510.00</b> | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>Q</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2008</b> |                          |            |                          |                         |                          |                     |                       |                              |          |     |
|          | Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan           | 1                        | 4          | -                        | 4                       | -                        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | Temuan Kelemahan SPI                            | 7                        | 21         | -                        | 21                      | -                        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | Lain-lain                                       | 12                       | 32         | 845,930,957.00           | 30                      | 737,426,937.00           | 2                   | 108,504,020.00        | 0                            | -        |     |
|          | Pilkada 2005                                    | 13                       | 16         | 8,136,196.00             | 16                      | 8,136,196.00             | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | Wajardikdas                                     | 11                       | 26         | -                        | 26                      | -                        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (Q)</b>                           | <b>44</b>                | <b>99</b>  | <b>854,067,153.00</b>    | <b>97</b>               | <b>745,563,133.00</b>    | <b>2</b>            | <b>108,504,020.00</b> | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>R</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2007</b> |                          |            |                          |                         |                          |                     |                       |                              |          |     |
|          | Temuan Kepatuhan                                | 6                        | 8          | 11,814,254,599.00        | 8                       | 11,814,254,599.00        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | Temuan Kelemahan SPI                            | 5                        | 5          | -                        | 5                       | -                        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | Belanja Daerah                                  | 9                        | 26         | 2,083,003,435.28         | 25                      | 1,646,003,435.28         | 1                   | 437,000,000.00        | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (R)</b>                           | <b>20</b>                | <b>39</b>  | <b>13,897,249,034.28</b> | <b>38</b>               | <b>13,460,249,034.28</b> | <b>1</b>            | <b>437,000,000.00</b> | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>S</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2006</b> |                          |            |                          |                         |                          |                     |                       |                              |          |     |
|          | Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan           | 7                        | 16         | 10,131,759,997.00        | 13                      | 9,435,801,827.00         | 3                   | 635.273.353.00        | 0                            | -        |     |
|          | Temuan Kelemahan SPI                            | 3                        | 7          | -                        | 7                       | -                        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | Bantuan Parpol                                  | 2                        | 3          | -                        | 3                       | -                        | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |
|          | <b>Sub Jumlah (S)</b>                           | <b>12</b>                | <b>26</b>  | <b>10,131,759,997.00</b> | <b>23</b>               | <b>9,435,801,827.00</b>  | <b>3</b>            | <b>635.273.353.00</b> | <b>0</b>                     | <b>-</b> |     |
| <b>T</b> | <b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2005</b> |                          |            |                          |                         |                          |                     |                       |                              |          |     |
|          | Laporan Keuangan Daerah Tahun 2005              | 13                       | 20         | 1,696,047,946.10         | 20                      | 1,696,047,946.10         | 0                   | -                     | 0                            | -        |     |

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA  
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : ITJEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Posisi Per : 31 Desember 2024

| Kode | HAPSEM                                    | TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN |       |              | SELESAI DITINDAKLANJUTI |       |              | TEMUAN DALAM PROSES |       |            | TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI |       |            | KETERANGAN                                                      |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|-------------------------|-------|--------------|---------------------|-------|------------|------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|      | Lingkup Pemeriksaan Kelompok Temuan       | JUMLAH                   |       | Nilai (Rp)   | JUMLAH                  |       | Nilai (Rp)   | JUMLAH              |       | Nilai (Rp) | JUMLAH                       |       | Nilai (Rp) |                                                                 |
|      |                                           | Temuan                   | Saran |              | Temuan                  | Saran |              | Temuan              | Saran |            | Temuan                       | Saran |            |                                                                 |
| 1    | 2                                         | 3                        | 4     | 5            | 6                       | 7     | 8            | 9                   | 10    | 11         | 12                           | 13    | 14         | 15                                                              |
| A    | HP TAHUN 2024                             |                          |       |              |                         |       |              |                     |       |            |                              |       |            |                                                                 |
| 1    | Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) | 2                        | 13    | 1.149.591,00 | 2                       | 13    | 1.149.591,00 | 0                   | 0     | -          | 0                            | 0     | -          | Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik pada Dinas P&K Kabupaten Cilacap |

\* Data Akumulasi Semester I dan II Tahun 2024

\*\* Tabel sesuai dengan Lampiran PermenPAN No. 9 Tahun 2009 dengan kolom temuan sulit ditindaklanjuti diganti dengan kolom keterangan.

Cilacap, 24 Februari 2025

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**



**ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si, CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681027 199001 1 001